Antara lain penjelasan pimpinan Pansus di media

online soal sistem pemilu Jerman yang biasa

disebut personalisierte verhaeltniswahl, soal

ambang batas lima persen, dan lain-lain. "Agak-

Institute of Global and Area Studies (GIGA) untuk

melakukan studi banding pemilu Jerman, juga

dinilai Pipit tidak pas. Sebab, Ufen adalah seorang

ahli politik. Di sebuah situs berita online, seorang

anggota Pansus mengungkapkan bahwa Andreas

mau bertanya tentang pemilu Jerman, bisa lang-

sung ke Prof Dieter Nohlen atau Prof Friedrich

Pukelsheim. Keduanya, kata Pipit, bahkan bukan

hanya pakar pemilu Jerman, tapi pakar pemilu

kata Pipit, bisa dilakukan lewat Bundeszentrale

fuer politische Bildung atau Lembaga Negara

Urusan Pendidikan Politik Federal (LNUPPF).

Kantor lembaga ini jaraknya hanya sekitar dua

kilometer dari KBRI. Dari Wisma KBRI, ke-

diaman Duta Besar RI di Jerman dengan

"Kalau mengundang mereka melalui Lembaga

Urusan Pendidikan Politik Federal ini malah

gratis, karena memberikan pendidikan politik

adalah tugas mereka. Lembaga saya, Watch

Indonesia, sering mengundang para ahli dari

Lembaga Negara Urusan Pendidikan Politik

Pipit mengaku sering bersepeda dari ke-

diamannya ke Lembaga Negara Urusan Pendidik-

an Politik Federal. "Jaraknya dari rumah saya

sekitar empat kilometer. Saya sering ke sana ka-

rena lembaga ini sering mengeluarkan buku

murah dan majalah gratis. Padahal di tempat lain,

buku-buku tebal-tebal yang diterbitkan lembaga

ini bisa dijual 30 sampai 40 euro," kata Pipit. Selain di tingkat federal, lembaga serupa juga

ada di tingkat negara bagian. Namanya adalah

Landeszentrale fuer politische Bildung, yang juga

Prof Andreas Ufen dari GIGA diundang untuk

bertemu dengan Pansus RUU Pemilu di Wisma

KBRI, atau kediaman dubes. Jaraknya sangat

jauh, sekitar dua ratus kilometer. Sebab, GIGA

diisi oleh para pakar pemilu dan kepartaian

Tiga hari yang absurd

Federal, dan gratis," kata Pipit.

LNUPPF, jaraknya sekitar 7-8 kilometer.

Mengundang Dieter Nohlen dan Pukeslheim,

Mestinya, kata Pipit, kalau Pansus memang

Mengundang Andreas Ufen dari German

nya salah denger," katanya.

Ufen adalah ahli Asia selatan.

Teraju



Studi Banding RUU Pemilu APA YANG DICARI?

OLEH HARUN HUSEIN

Aneh, Pansus RUU Pemilu melakukan studi banding sistem pemilu ke negara penganut sistem MMP, padahal di Pansus sendiri sistem tersebut tak dilirik.

arena nonton bola di televisi berbeda dengan nonton bola di lapangan. Itulah analogi yang dipakai salah seorang pimpinan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu), untuk membenarkan studi banding ke

Jerman dan Meksiko. Valid-kah alasan itu? Studi banding ke negara Eropa Barat dan Amerika Latin, itu, berlangsung pada 11-16 Maret 2014. Kunjungan ke Jerman dipimpin oleh Ketua Pansus, Lukman Edy (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa). Sedangkan, kunjungan ke Meksiko dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Benny Kabur Harman (Fraksi Partai Demokrat). Sebanyak 15 orang anggota Pansus ke Jerman, 15 anggota Pansus lainnya ke Meksiko.

Jadwal studi banding 11-16 Maret itu bukan merupakan waktu mereka berada di Jerman dan Meksiko, tapi termasuk perjalanannya. Mereka berangkat dari Jakarta tanggal 11, dan sudah berada di Tanah Air pada 16 Maret. Walhasil, dipotong waktu perjalanan, waktu efektif mereka di negeri orang hanya tiga hari. Jika ditambah dengan waktu shopping dan darmawisata, maka waktu efektifnya akan lebih mengkerut lagi.

Dari berbagai pemberitaan, ada sejumlah hal yang akan mereka pelajari di Jerman dan Meksiko. Mulai dari sistem pemilu, electronic voting (e-voting), pemilu serentak, hingga peradilan pemilu. Tapi, mengapa harus jauhjauh bila hanya ingin mencari tahu tentang topik itu? Bukankah kajian tentang topik itu di dalam negeri sudah bejibun?

Selain dalih berbedanya menonton bola di lapangan dan televisi, alasan lain perlunya studi banding, yang pernah disampaikan Benny Kabur Harman, adalah karena masukan para pakar di dalam negeri tidak bermutu. Alasan yang sungguh melecehkan dan telah membuat tersinggung para pakar dan ahli pemilu di Indonesia.

Sudah mengkristal

Tapi, benar-benar urgenkah kunjungan itu, mengingat tahapan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu sudah selesai menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM), yang berarti sikap fraksi-fraksi sudah

mengkristal? Kalau DIM sudah selesai disusun, lalu apa lagi yang mereka cari dalam studi banding? Mungkinkah partai/fraksi itu akan mengubah sikapnya setelah studi banding ke negara orang? Mungkin pulakah waktu tiga hari itu cukup untuk mempelajari banyak hal tentang pemilu di Jerman dan Meksiko?

Dari sisi sistem pemilu, dua negara yang dikunjungi oleh para anggota Pansus, adalah penganut sistem Mixed Member Proportional Representation (MMP). Ini merupakan sistem pemilu *hybrid*. Umumnya merupakan penggabungan dari Sistem Proporsional Daftar (List Proportional Representation) dari keluarga Sistem Proporsional, dengan Sistem First Past The Post (FPTP) dari keluarga Sistem Mayoritas/Pluralitas.

Sistem pemilu kedua negara tersebut, sama dengan menggabungkan sistem distrik yang sering diwacanakan di penghujung Orde Baru, dengan sistem proporsional tertutup yang diterapkan dalam delapan kali pemilu di Indonesia sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999. FPTP atau di Indonesia biasa disebut dengan sistem distrik, adalah sistem yang dianut oleh Amerika Serikat, India, Kanada,

Bangladesh, Ethiopia, Malaysia, dan Nigeria. Sistem pemilu lainnya yang mirip dengan MMP adalah Sistem Paralel. Baik MMP maupun Sistem Paralel, dikelompokkan dalam keluarga Sistem Campuran (*Mixed*), karena keduanya memadukan dua sistem utama (proporsional dan mayoritas/pluralitas) untuk mengambil kelebihannya. Perbedaan Sistem MMP dengan Sistem Paralel adalah

makan Sistem MMP.

sistem campuran.

Masalahnya, jika sistem pemilunya yang

mau dipelajari, sebenarnya sikap fraksi-fraksi

di DPR pun sudah mengkristal. PDIP dan

Golkar mengusulkan sistem tertutup (*list*

PR); PKB, PAN, PPP, PKS, Nasdem, Hanura,

dan Gerindra mengusulkan sistem propor-

sional terbuka murni (*open list PR*) seperti

Pemilu 2009 dan Pemilu 2014; pemerintah

mengusulkan sistem proporsional terbuka

terbatas (semi open list PR) seperti Pemilu

2004; dan Partai Demokrat mengusulkan

hanya usulan Partai Demokrat yang mende-

kati sistem MMP yang dianut negara tujuan

studi banding. Itu berarti, MMP ini merupa-

kan yang paling kecil peminatnya di DPR.

Lalu, apakah studi banding ke Jerman dan

Meksiko itu berarti Pansus saat ini benar-

benar sedang mempertimbangkan untuk

mengadopsi sistem usulan Partai Demokrat?

Kalau memang tidak, mengapa harus capek-

capek mempelajari sistem itu sampai jauh-

ini sudah lama dikembangkan di Indonesia.

Pada tahun 2011 lalu, Center for Electoral Re-

form (Cetro), sudah pernah mengusulkan

sistem ini, dengan nama Sistem Proporsional

Campuran. Usulan Cetro saat itu, dari 560

kursi DPR, sebanyak 280 kursi dipilih dengan

sistem proporsional tertutup (PR List), dan

280 kursi lainnya dipilih dengan Sistem FPTP

huan Indonesia (LIPI) juga mengeluarkan

Pada 2017 ini, Lembaga Ilmu Pengeta-

Lagipula, gagasan tentang sistem MMP

jauh menyeberang benua?

alias sistem distrik.

Dilihat dari sisi usulan sistem pemilu,

pada hubungan hasilnya. Jika hasil Sistem Proporsional dan Mayoritas/Pluralitas tidak saling bergantung dan berhubungan dalam penentuan kursi, maka sistem itu disebut Sistem Paralel. Tapi, jika hasil Sistem Proporsional dan Mayoritas/Pluralitas berhubungan dalam penentuan kursi, maka dina-

TUJUH NEGARA YANG MENERAPKAN SISTEM MMP

Berdasarkan data ACE Electoral Knowledge Network, saat ini ada tujuh negara di dunia yang menerapkan sistem Mixed Member Proportional Representation (MMP). Ketujuh negara itu menggabungkan dua sistem pemilu, yaitu Sistem Proporsional Daftar (List Proportional Representation) dari keluarga Sistem Proporsional (Proportional Representation) dengan Sistem First Past the Post (FPTP) dari keluarga Sistem Mayoritas/Pluralitas (Majority/Plurality). Berikut daftar negara-negara tersebut berikut jumlah dan persentase kursi yang mereka alokasikan untuk masing-masing sistem.

Negara	Kursi PR List	Kursi FPTP	Total
1. Bolivia	60 [46%]	70 (54%)	130
2. Hongaria	93 (47%)	106 (53%)	199
3. Jerman	299 (50%)	299 (50%)	598
4. Lesotho	40 (33%)	80 (67%)	120
5. Meksiko	200 (40%)	300 (60%)	500
6. Selandia Baru	50 (42%)	70 (58%)	120
7. Venezuela	52 (32%)	113 (68%)	165

 Reserved seats untuk kalangan minoritas di Bolivia adalah tujuh kursi, sedangkan di Venezuela tiga kursi. Kursi-kursi itu diambil dari kursi yang diperebutkan dalam sistem mayoritas/pluralitas.

Baiklah, soal sistem pemilu terkait banyak hal, seperti alokasi kursi, daerah pemilihan, ambang batas (threshold), hingga metode konversi suara menjadi kursi (electoral formula). Tapi, hasil kajian dan studi banding semua elemen-elemen sistem pemilu tersebut sebenarnya sudah mampir ke Senayan, dalam berbagai bentuk. Baik naskah akademik dan kajian lainnya, maupun dalam bentuk draf

Penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan pemerintah ke DPR, kajian komprehensif juga disampaikan masyarakat sipil. Wujudnya adalah Naskah Akademik dan Draf Kodifikasi RUU Penyelenggaraan Pemilu dari Koalisi Masyarakat Sipil, Naskah Akademik dan Draf RUU Kitab Hukum Pemilu dari Kemitraan, Pendalaman Gagasan Kepemiluan Indonesia dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, berbagai kajian LIPI, dan lain-lain.

Pendek kata, kajian kepemiluan dengan studi banding sistem pemilu dan berbagai aspek kepemiluan lainnya dari berbagai negara, sudah bejibun. Bahkan, kajian-kajian tersebut bukan berasal dari studi literatur semata, tapi juga berdasarkan studi banding para pakar pemilu Indonesia saat mengikuti berbagai kegiatan internasional kepemiluan, seperti seminar, diskusi, dan pemantauan pemilu, yang kemudian diperkaya dengan berbagai pengalaman dan studi literatur. Indonesia pun sudah berulangkali mengundang pakar pemilu berskala internasional.

Studi banding yang dilakukan DPR sendiri, selama ini sebenarnya amat perlu dipertanyakan kualitasnya, karena tidak pernah jelas output-nya. Masuk di bab, pasal, dan ayat mana hasil studi banding itu, tidak pernah jelas. Lagipula, studi banding itu seharusnya dilakukan saat penyusunan naskah akademik, bukan setelah naskah akademik dan draf RUU telah selesai dibuat, apalagi DIM-nya sudah tersusun. Kalau semua kejanggalan ini tak bisa dijelaskan dan dipertanggung jawabkan, maka yang dilakukan

jalan-jalan alias plesiran pakai uang rakyat. Betapa pun dalam pembahasan sebuah RUU memang dibolehkan studi banding ke luar negeri, namun Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib telah mengatur rambu-rambunya. Studi banding itu harus mempertimbangkan urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan negara tujuan dengan materi

keterkaitan negara tujuan dengan materi RUU, jika sistem pemilu yang ingin diterapkan mayoritas partai di Indonesia berbeda dengan sistem pemilu Jerman dan Meksiko? Sebenarnya, apa yang Pansus cari? ■

kajian tentang Sistem Paralel. LIPI menyebutnya Sistem Campuran atau Mixed Member Majoritarian (MMM). LIPI mengusulkan 392 kursi (70 persen) DPR dipilih dengan sistem proporsional tertutup, dan 168 kursi (30 persen) kursi lainnya dipilih dengan sistem mayoritas/pluralitas dengan distrik pemilihan berwakil tunggal alias FPTP.

Kalau mau mengkaji sistem pemilu, Pansus sebenarnya lebih tepat melakukan studi banding ke Brasil. Sebab, negaranya Pele, itu, menerapkan sistem proporsional terbuka (open list) seperti yang diterapkan Indonesia. Selain bisa melihat sendiri baikburuknya sistem proporsional terbuka, Brasil pun dinilai sukses menggelar pemilu serentak nasional-lokal dan menerapkan e-voting.

Selain kemiripan sistem pemilu dengan Indonesia, Brasil juga masih memiliki banyak kemiripan lain dengan Indonesia, dari sisi besaran parlemen (jumlah kursi majelis rendah/DPR), sistem parlemen dua kamar, sistem kepartaian majemuk (multipartai), negara berkembang, banyak korupsi politik, bejibun kisah money politics dalam pemilu, serta sama-sama beriklim tropis.

Selain Naskah Akademik dan Draf RUU



'Belajar Sistem Pemilu Tiga Hari Itu Absurd'

Pernyataan pimpinan Pansus RUU Pemilu bahwa sistem pemilu MMP tidak kompatibel dengan sistem presidensial dinilai ganjil.

da sebuah cerita lucu nan mengenaskan sebelum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berangkat tersebut diceritakan oleh peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pipit R Kartawidjaja, awal pekan ini.

Usai memberikan paparan dalam sebuah rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di DPR, Pipit dihampiri seorang pimpinan pansus Sang legislator itu bercerita bahwa dia telah menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jerman untuk menanyakan siapa ahli pemilu Jerman. Tapi, jawaban dari KBRI sungguh mengejutkan, karena mereka mengatakan orang yang ahli tentang pemilu Jerman adalah Pipit R Kartawidjaja. "Tapi, orangnya sekarang ada di Indonesia," jawab pihak KBRI.

Mendengar curhatan sang pimpinan Pansus, Pipit tertawa. Penulis sejumlah buku sistem pemilu dan matematika pemilu, ini, pun kemudian berkata kepada sang pimpinan Pansus, "Yaa udah nggak usah jauh-jauh ke Jerman. Sini saya kursusin, sehari kelar. Tapi kelihatan dia tetap *ngotot* [berangkat studi banding]."

Pipit yang masih merupakan presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, ini, kemudian mengecek kebenaran kabar tersebut ke KBRI Jerman di Berlin. "Sava cek KBRI, memang benar ada permintaan itu, dan mereka di sana juga kelabakan," kata Pipit yang juga pimpinan Watch Indonesia di Berlin.

Pasalnya, kata Pipit, dalam urusan pemilu dan kepartaian yang sangat teknis, biasanya yang dimintai bantuan oleh KBRI untuk menjelaskan dan menjadi penerjemah adalah Pipit. Tapi, kini Pipit justru sedang tak ada di Berlin. Padahal, urusan pemilu terbilang kompleks, dan tak sembarang penerjemah bisa memberi penjelasan. "Kalau biasanya ada dari yang dari Indonesia

era Pak Fauzi Bowo menjadi dubes,

biasanya saya yang diminta jadi

penerjemah gitu-gituan.

Karena memahami sistem

pemilu Jerman itu susah.

Lebih susah dari sistem

mah yang cocok," kata Pipit. Misalnya, kata Pipit, saat dijelaskan tentang bantuan negara kepada partai, kadang delegasi dari Indonesia menangkapnya sebagai bantuan pemerintah. "Langsung dibilang bantuan pemerintah. Padahal *ndak* ada itu bantuan pemerintah. Negara bukan pemerintah. Dana bantuan kepada partai di Jerman memang dari APBN, tapi tidak lewat Kemendagri, ketua DPR juga tidak ikut

Pipit juga pensiunan pegawai publik di Jerman, juga kerap mendapat pertanyaan dari delegasi di Indonesia tentang rumah sakit pemerintah dan sebagainya. "Saya bilang di Jerman nggak ada rumah sakit pemerintah. Yang ada rumah sakit publik. Tapi, rumah sakit publik inilah yang dikelola pemerintah.

Dia pun mengungkapkan perbedaan penggunaan istilah negara dan publik. "Di Jerman itu, pegawai negara terbagi dua. Pertama, pegawai negeri atau PNS yang khusus untuk orang Jerman dan Uni Eropa. Kedua, pegawai publik yang lintas negara. Di UU ASN (Aparatur Sipil Negara) kita, sebutannya ada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja (P3K). P3K itulah yang seperti pegawai publik. Tapi, istilah pegawai negeri dan pegawai pemerintah di kita memang masih kurang jelas," katanya.

Statement ganjil

Pipit pun mengaku mencium keanehan membaca *statement* seorang pimpinan pansus di sebuah media *online*, setelah bertemu dengan seorang ahli politik Jerman, Profesor Andreas Ufen. Sang pimpinan Pansus, mengutip Ufen, mengatakan sistem Mixed Member Proportional (MMP) seperti yang diterapkan di Jerman merupakan sistem terbaik di dunia, tapi tidak cocok diterapkan di negara penganut sistem presidensial seperti Indonesia.

"Kalau bilang sistem MMP tidak kompatibel dengan sistem presidensial, saya yakin pimpinan Pansus itu salah mengerti. Andreas Ufen nggak mungkin bilang begitu. Karena di dunia ini yang menerapkan MMP bukan hanya negara penganut sistem parlementer seperti Jerman, tapi juga penganut sistem presidensial. Meksiko dan Venezuela yang menganut sistem presidensial

kan pakai MMP," kata Pipit. Lagipula, sudah merupakan konsensus di antara para ahli pemilu dunia, termasuk disampaikan ahli pemilu Jerman, Profesor Dieter Nohlen, bahwa tidak ada sistem pemilu yang terbaik di dunia ini. Karena itu, para ahli pun merekomendasikan setiap negara demokrasi untuk mencari dan menerapkan sistem yang

agak janggal dari pemaparan anggota Pansus usai bertemu Andreas Ufen, yang masih perlu klarifikasi apakah

terletak di negara bagian Hamburg. "Kalau jauhjauh ngundang Prof Ufen dari Hamburg ke Berlin, kenapa nggak sekalian aja beliau diundang ke Nuswantoro (Indonesia)," kata Pipit. GIGA ini pun, kata Pipit, merupakan sebuah NGO --seperti halnya Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)-- meskipun sebagian besar kegiatannya didanai negara. "Kalau mengundang

itu merupakan pernyataan

Ufen atau kekeliruan

anggota Pansus me-

Prof Andreas Ufen dari GIGA kemungkinan nggak gratis. GIGA sudah lama saya kenal, tulisantulisannya bagus. Tapi, kalau jagonya pemilu, yaa Dieter Nohlen, Pukelsheim, dan lain-lain." Menurut Pipit, kalau memang mau studi banding sistem pemilu Jerman, alokasi waktu tiga hari juga terlalu mepet. "Waktu tiga hari untuk belajar sistem pemilu Jerman itu absurd. Itu belum lagi soal *jetlag*. Kalau pesawat ke Jerman yang lewat Turki itu biasanya sampai di

jetlag dulu. Saya saja yang sering bolak-balik Jakarta-Berlin selalu *jetlag*, *kok*," kata Pipit. Selain itu, sistem pemilu Jerman itu tidak mudah dipahami, karena sangat berbeda dengan sistem pemilu lainnya. "Makanya ada yang bilang sistem pemilu Jerman itu adalah sistem proporsional nan personal. Sistem proporsional, tapi pilihan personal. Personalnya ini juga bukan ditentukan pemilihan dengan sistem mayoritas, tapi proporsional. Itu belum soal dapil, metode

Berlin pada Minggu siang sekitar jam 10-11.

Nggak mungkin langsung studi banding, karena

penghitungan, dan lain-lainnya," katanya. Kalau ingin benar-benar belajar sistem pemilu Jerman, kata Pipit, minimal Pansus mengalokasikan waktu sebulan. "Seminggu itu untuk jetlag, tiga minggu untuk benar-benar-benar belajar. Tapi, kalau mau belajar soal pemilu Jerman sebenarnya buka saja di internet, semua sudah ada. Ngapain studi banding," katanya.

Pipit mengatakan, persoalan jetlag itu sering sangat mengganggu. "Istri saya dosen di Universitas Hamburg. Dia juga sering diminta tolong sama KBRI untuk menemani tamu dari Indonesia, termasuk anggota DPR. Istri saya sering merasa malu karena saat orang Jerman ngomong, susahpayah diterjemahin, sebagian besar anggota DPR malah tidur," kata Pipit.

Saat ini, berdasarkan informasi yang diperoleh Pipit dari KBRI Jerman, para anggota Pansus antara lain mengunjungi Mahkamah Konstitusi Jerman, Bundestag, dan Landeswahleiter.

E-voting Jerman

Soal alasan Pansus studi banding ke Jerman karena mendengar telah ada rencana Jerman untuk mengevaluasi e-voting, juga dinilai Pipit merupakan kabar yang belum pernah didengarnya. "Sejak 2009 MK memutuskan tidak boleh menggunakan e-voting, sampai saat ini saya belum dengar mau diterapkan lagi," kata Pipit.

Seperti diberitakan Republika sebelumnya, MK Jerman memutuskan membatalkan penggunaan *e-voting* pada 3 Maret 2009 lalu, antara lain karena bertentangan dengan prinsip pemilu yang bersifat publik. "(Penerapan e-voting) menutup hak setiap orang untuk mengawasi proses penghitungan suara, karena dilakukan secara otomatis oleh komputer yang hanya diketahui ahli komputer atau IT," kata hakim konstitusi Jerman, Rudolf Mellinghoff, saat menghadiri konferensi Hakim MK se-Asia bertajuk "Konstitusionalitas E-Voting dan Peran MK" yang digelar di Jakarta, medio Juli 2010 lalu. ■